

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.* UU Nomor 20 Tahun 2001. LN No. 134 Tahun 2001. TLN No. 4150.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.* UU Nomor 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.

### B. Buku

Abidin, Zamhari. *Pengertian dan Asas Pidana Schema dan Synopsis.* Jakarta: Djambatan, 1989.

Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arief, Barda Nawawi. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana).* Semarang: Pustaka Magister, 2017.

Atmasasmita, Romli. *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional.* Bandung: Mandar Maju, 2004.

BPKP. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, 1999.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas).* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

- Efendi, A'an, et. al. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasibuan, Albert. *Titik Pandang Untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016).
- H.K., Hermien. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- H.S., Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Lubis, M. dan J.C. Scott. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

\_\_\_\_\_. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Moeljatno. *Perbuatan, Pertanggungjawaban dan Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

\_\_\_\_\_. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

\_\_\_\_\_. *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Ikahi, 2007.

\_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Prodjohamidjoyo, Martiman. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka, 1997.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Salama, Nadiatus. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010.

Shoim, Muhammad. *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2009.

Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia, 1982.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sudrajat, M. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Remadja Karya, 1986.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Tim Redaksi. *KUHP dan KUHAP*. Surabaya: Kesindo Utama, 2012.

Usfah, Fuad, Moh. Najih, dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Pres, 2004.

Wijaya, Firman. *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Penaku Bekerjasama dengan Maharini Press, 2008.

Yunara, Eddy. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Yuwono, Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*. Bandung: Alumni, 1982.

### C. Lain-lain

Al Kautsar, Izzy. "Wajah Hukum Indonesia: Analisa Singkat Kasus Mantan Jaksa Pinangki". Tersedia di: <https://jlamb.or.id/2021/06/26/wajah-hukum-indonesia-analisa-singkat-kasus-mantan-jaksa-pinangki/>. Diakses tanggal 15 April 2022.

Guritno, Tatang. "Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya". Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/17/13481551/vonis-pinangki-dipangkas-6-tahun-pakar-negara-tak-lagi-anggap-korupsi-bahaya>. Diakses tanggal 15 April 2022.

Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 7. Nomor 1, Maret 2018.

Harshap, Rizki Syahbana Amin. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)". *Tesis*. Medan: Program Magister Ilmu Hukum. USU, 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring". Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan>. Diakses tanggal 28 Januari 2022.

Rizal, Jawahir Gustav. "Kilas Balik Kasus Jaksa Pinangki, dari Viral di Medsos hingga Keengganan JPU Ajukan Kasasi". Tersedia di: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/07/200500965/kilas-balik-kasus-jaksa-pinangki-dari-viral-di-medsos-hingga-keengganan-jpu?page=all>. Diakses tanggal 1 Januari 2022.

Tim Redaksi. "5 Arti Pengurangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)". Tersedia di: <https://kbbi.lektur.id/pengurangan>. Diakses tanggal 1 Januari 2022.

\_\_\_\_\_. "6 Arti Alasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)". Tersedia di: <https://kbbi.lektur.id/alasan>. Diakses tanggal 1 Januari 2022.

Yozami, M. Agus. "Putusan Banding Pinangki Disebut Kemunduran Pemberantasan Korupsi". Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-banding-pinangki-disebut-kemunduran-pemberantasan-korupsi-1t60cac0c1adc1f>. Diakses tanggal 15 April 2022.